

PENGUATAN PERAN GURU DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR DI SEKOLAH DASAR

Agustinus Tangu Daga

Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Weetebula Sumba NTT Indonesia

Email: agus_daga@yahoo.com

Abstrak: Guru memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan merdeka belajar di sekolah. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kebijakan merdeka belajar, landasan filosofis merdeka belajar, dan peran guru dalam implementasi merdeka belajar di sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kebijakan merdeka belajar meliputi yaitu ujian sekolah berstandar nasional, ujian nasional diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran, penerimaan siswa baru dengan zonasi diperluas; (2) landasan filosofi merdeka belajar meliputi progresivisme, konstruktivisme, humanisme, filosofi antropologis, dan filosofi pendidikan Ki Hadjar Dewantara; (3) peran guru dalam pembelajaran sangat bervariasi meliputi pengelola kelas, fasilitator, motivator, demonstrator, mediator, evaluator, untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional. Untuk mengoptimalkan peran guru dalam merdeka belajar maka diperlukan pelatihan membuat perangkat dan praktek pembelajaran berbasis merdeka belajar bagi guru, pengembang kurikulum di sekolah perlu menterjemahkan program merdeka belajar secara konkrit agar mudah dipahami dan dijalankan oleh guru, pihak sekolah mendorong dukungan dari berbagai stakeholder, mendorong penelitian dan publikasi tentang merdeka belajar di sekolah dasar.

Kata kunci: peran guru; merdeka belajar; filosofi; sekolah dasar

Abstract: Teachers have an important role in implementing of independent learning policies in schools. The purpose of this research is to describe the policy of independent learning, its philosophical foundation, and the role of teachers in the implementation of the independent learning program in elementary schools. This research uses the library method. In analyzing the data, this research uses content analysis. The results showed that (1) the policy of independent learning includes national standardized school exams, national exams are converted into minimum competency assessments and character surveys, simplification of the lesson plan, submission of new students based on zoning is expanded; (2) the foundation of independent learning philosophy includes progressivism, constructivism, humanism, anthropological philosophy, and educational philosophy of Ki Hadjar Dewantara; (3) teachers' roles in learning varies greatly including as class managers, facilitators, motivators, demonstrators, mediators, evaluators. To optimize the role of teachers, training to create the tools and practices the independent learning are greatly needed for teachers, curriculum developers in schools need to translate independent learning programs concretely so that it is easy to understand and run by teachers, the school encourages support from various stakeholders, encourages research and publication on independent learning in the elementary schools .

Keywords: role of teacher; independent learning; philosophy; elementary school

PENDAHULUAN

Tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang berkualitas secara utuh dan optimal. Manusia yang berkualitas sangat dibutuhkan dalam era revolusi industry 4.0 maupun society 5.0. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa tujuan pendidikan Indonesia antara lain mengembangkan potensi siswa menjadi manusia yang berilmu, cakap, kreatif, mandiri. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan kebijakan merdeka belajar untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Empat kebijakan merdeka belajar meliputi ujian sekolah berstandar nasional, ujian nasional, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan sistem zonasi penerimaan siswa baru (Mulyono 2020; Sularto 2020). Dari pihak guru, melalui merdeka belajar guru memiliki kesempatan yang luas mengembangkan kapasitas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menjadi lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar siswa (Hendri 2020).

Guru memiliki peran strategis baik dalam implementasi maupun keberhasilan kebijakan merdeka belajar. Peran guru tersebut tersebut dimungkinkan karena merdeka belajar memberikan kebebasan kepada guru baik dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran maupun dalam mengevaluasi pembelajaran. Dengan kebebasan tersebut guru dapat membantu siswa baik dalam memperoleh ilmu pengetahuan maupun dalam mencapai kompetensi yang dibutuhkan untuk hidup pada masa yang akan datang. Dan merujuk pada pandangan John Dewey bahwa pendidikan merupakan proses yang memerdekakan maka Christiana (2013) mengatakan bahwa pendidikan dalam merdeka belajar merupakan sebuah proses hidup dan bukan sekedar persiapan untuk kehidupan masa depan. Dalam konteks inilah merdeka belajar menjadi bagian pokok dari usaha bersama untuk menghasilkan manusia yang berkualitas (Widodo et al. 2020). Merdeka belajar berarti bahwa baik guru maupun siswa memiliki kebebasan berinovasi, kebebasan untuk belajar secara mandiri dan kreatif melalui penciptaan suasana belajar yang bahagia (Rosida 2020).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan dalam pidato pada peringatan hari guru nasional tahun 2019 bahwa profesi guru merupakan sebuah profesi yang luhur untuk membentuk masa depan bangsa. Namun guru melaksanakan profesi tersebut dengan peraturan yang memberatkan sehingga guru lebih banyak menggunakan waktu untuk mengerjakan tugas-tugas administrasi daripada menolong siswa yang mengalami ketertinggalan di kelas (Kusumaryono 2020). Pernyataan tersebut menekankan tentang martabat luhur profesi guru dan kesulitan guru dalam menjalankan profesinya.

Guru dibebani dengan tugas-tugas administrasi pendidikan dibandingkan dengan tugas mendidik dan mengajar. Proses pembelajaran yang berkualitas tidak akan terjadi jika guru lebih banyak waktu mengerjakan administrasi pendidikan. Kebijakan merdeka belajar dapat memfasilitasi guru menjalankan tugas secara baik dalam proses pembelajaran atau dalam meningkatkan hasil belajar siswa tanpa dibebani dengan administrasi pembelajaran yang memberatkan. Penelitian Ahmal et al (2020) terhadap guru-guru di Kabupaten Pelalawan Riau menunjukkan bahwa pelatihan merdeka belajar dapat meningkatkan kompetensi pedagogik guru khususnya dalam merancang perangkat pembelajaran abad 21 berbasis merdeka belajar. Penelitian Siagian (2020) tentang kemampuan guru menyusun RPP merdeka belajar menunjukkan bahwa tingkat pemahaman guru tentang RPP merdeka belajar adalah 91.9%, kemampuan guru menyusun RPP merdeka belajar berbasis daring sebanyak 96%, dan kemandirian guru menyusun RPP merdeka belajar daring adalah 96%. Penelitian Widyastuti (2020) tentang persepsi guru tentang merdeka belajar di kabupaten Sleman Yogyakarta menunjukkan bahwa guru-guru merasa terbantu dengan adanya merdeka belajar. Misalnya RPP sederhana membantu guru lebih fokus mengajar dan tidak menghabiskan banyak kertas untuk mencetak RPP yang begitu banyak, guru merasa lebih bebas merancang dan melaksanakan pembelajaran dan siswa lebih senang dalam proses pembelajaran.

Merdeka belajar adalah kemerdekaan berpikir. Esensi kemerdekaan berpikir ini harus ada dan mulai pada guru lebih dahulu. Tanpa ada kemerdekaan berpikir pada guru akan sukar ada kemerdekaan berpikir pada siswa (Hendri 2020; Widiyono et al. 2021) sehingga menghasilkan siswa yang unggul, kritis, kreatif, kolaboratif, inovatif, serta partisipasi pada masa yang akan datang (Siregar et al. 2020). dalam cara yang sama Bahar & Sund (2020) mengataka bahwa merdeka membangun suasana yang membahagiakan dalam belajar dan pembelajaran, mengonstruksi kemerdekaan berpikir guru dan siswa, yang menjadikan siswa sebagai subyek utama pendidikan, serta memfasilitasi cara belajar siswa yang membebaskan sehingga menjadi lebih kritis, kreatif, dan inovatif dalam mempelajari materi pembelajaran..

Sesuai penjelasan diatas masalah yang dialami oleh para guru adalah guru lebih banyak menggunakan waktu untuk mengerjakan tugas-tugas yang berkaitan dengan

administrasi pendidikan. Hal ini membuat guru kurang maksimal dalam menjalankan perannya dalam proses pembelajaran. Selain itu, masih ditemukan masalah yang lain berkaitan dengan pemahaman dan kemampuan guru melaksanakan merdeka belajar dalam proses pembelajaran. Misalnya, Penelitian Jayanta & Agustika (2020) terhadap guru sekolah dasar menunjukkan bahwa pemahaman guru terhadap prinsip-prinsip dalam mengembangkan RPP merdeka belajar masih sangat kurang yaitu 44.68%. Penelitian Lestiyani (2020) juga menemukan bahwa bahwa terdapat 60% guru tidak memahami konsep merdeka belajar yang diterapkan di sekolahnya. Kemudian dalam mendesain rencana pembelajaran guru masih banyak yang menggunakan rencana pembelajaran dengan format kurikulum 2013. Demikian juga penelitian Johannes (2018) dan kemudian dikemukakan juga Probosiwi & Retnasari (2020) terhadap guru sekolah dasar menemukan bahwa bahwa para guru belum mampu menyusun RPP dengan baik dimana para guru masih kebingungan bagaimana menyusun RPP yang sesuai dengan format dalam kurikulum 2013 maupun merdeka belajar. Masalah lain yang dialami guru dalam melaksanakan program merdeka belajar adalah tentang evaluasi pembelajaran. Temuan tersebut dinyatakan oleh Amiruddin et al (2020) dalam penelitian terhadap para guru yang mendampingi mahasiswa dalam kegiatan praktek di sekolah dasar bahwa guru belum memahami benar cara penyusunan RPP berbasis merdeka belajar, guru belum memahami perubahan kurikulum yang berdampak pada perubahan komponen dalam RPP, dan guru kurang menguasai teknologi khususnya komputer. Selanjutnya, penelitian Izza et al (2020) menunjukkan bahwa guru masih kurang memahami penilaian pembelajaran dalam merdeka belajar. Penilaian pembelajaran yang dilaksanakan guru masih fokus pada penilaian hasil belajar sehingga penilaian proses kurang proporsional.

Berdasarkan penjelasan tersebut selain kesibukan dengan urusan administrasi pendidikan ditemukan pula bahwa masih banyak guru yang belum memahami dan melaksanakan perannya dalam kebijakan merdeka belajar khususnya dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Karena itu permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran guru sekolah dasar dalam implementasi kebijakan merdeka belajar di sekolah dasar? Tujuan penelitian ini adalah membahas dua hal pokok yaitu (1) konsep merdeka belajar; (2) peran guru dalam kebijakan merdeka belajar di sekolah dasar. Melalui penelitian ini, diharapkan guru akan lebih mengetahui dan memahami kebijakan merdeka belajar, dan perannya dalam mengimplementasikan merdeka belajar di sekolahnya. Pemahaman yang benar akan memudahkan guru menerapkan kebijakan merdeka belajar di sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode studi literatur. Literatur yang digunakan adalah literatur yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, seperti buku, artikel jurnal, prosiding dan laporan penelitian. Menurut Creswell dalam Habsy (2017) kajian literatur adalah ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori dan informasi baik masa lalu maupun saat ini. Pengambilan data penelitian dilaksanakan melalui pencarian di *google scholar*, *website* pemerintah seperti Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, serta *respository* di kampus peneliti. dalam pencarian tersebut peneliti menentukan *keyword* seperti peran guru dalam merdeka belajar, kebijakan merdeka belajar. Selanjutnya data yang diperoleh dari literatur dianalisis dengan metode analisis konten. Analisis konten adalah metode analisis data yang digunakan untuk menyimpulkan kata atau konsep yang ada di dalam teks atau literatur (Arafat 2018). Langkah-langkah analisis konten meliputi merumuskan pertanyaan penelitian, memilih sumber literatur yang relevan, menyeleksi data dalam literatur tersebut, membuat kategori yang digunakan dalam analisis, meringkas dan memperjelas isi ringkasan, menginterpretasi dan menjelaskan data yang diperoleh berdasarkan teori (Adipura 2008; Sumarno 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Merdeka Belajar

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim sebagaimana dikutip Kamil (2020) menjelaskan bahwa kebijakan merdeka belajar merupakan sebuah filosofi perubahan dari metode pembelajaran yang terjadi selama ini karena dalam merdeka belajar terdapat kemandirian dan kemerdekaan bagi lingkungan pendidikan menentukan cara terbaik dalam proses pembelajaran. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan 4 kebijakan pendidikan nasional merdeka belajar yaitu ujian sekolah berbasis nasional diganti dengan asesmen oleh sekolah, ujian nasional diubah menjadi kompetensi minimum dan survei karakter, penyederhanaan RPP, dan sistem zonasi

penerimaan peserta didik baru (PPDB) dilaksanakan secara fleksibel (Kemendikbud 2019). Kebijakan merdeka belajar adalah sebuah sistem pendidikan yang didalamnya mengutamakan kebebasan, baik bagi guru maupun bagi siswa (Wahdani & Burhanuddin 2020), dan jawaban atas masalah yang dihadapi oleh guru dalam praktik pendidikan (Yamin & Syahrir 2020). Senada dengan pendapat tersebut Sasikirana & Herlambang (2020) mengatakan bahwa konsep merdeka belajar merupakan jawaban terhadap berbagai persoalan dalam proses praktek pembelajaran dan kebutuhan sistem pendidikan di Indonesia dimana guru memiliki peran yang penting dalam proses pembelajaran. Menurut Rosyid (2020) dalam konteks perspektif transformasi pendidikan ke depan maka merdeka belajar diperlukan untuk mewujudkan mutu pendidikan berkelanjutan. Merdeka belajar terkait dengan upaya sekolah dalam menanamkan *lifelong learning capacity* sebagai tema sentral revolusi industri 4.0.

Esensi merdeka belajar adalah mengeksplorasi potensi terbaik para guru dan siswa untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri (Widiyono et al. 2021). Sistem pembelajaran akan berganti, dari yang awalnya tatap muka di dalam kelas akan menjadi di luar kelas. Suasana pembelajaran akan berjalan lebih leluasa karena siswa dapat berdiskusi dengan guru dan teman-temannya, mengalami pembelajaran dengan strategi dan pendekatan yang menyenangkan, terjadi pembentukan karakter. Setiap siswa memiliki kemampuan yang beragam sesuai dengan bakat dan minatnya. Menurut Miarti Yoga dalam Daga (2020a) merdeka belajar dapat diimplementasikan sebagai merdeka berpikir, merdeka, dan menghormati atau merespons perubahan yang terjadi. Merdeka belajar harus membebaskan baik untuk guru maupun siswa. Tujuan pendidikan adalah membebaskan. Tujuan merdeka belajar adalah kebahagiaan siswa, guru, dan orang tua. Sejalan dengan itu Syukri dalam Saleh (2020) menyatakan bahwa proses pendidikan dalam merdeka belajar menciptakan suasana-suasana yang membahagiakan yakni bahagia untuk guru, bahagia buat siswa, bahagia buat orang tua, dan bahagia buat semua orang.

Implementasi kebijakan merdeka belajar bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan agar dapat bersaing di era revolusi industry 4.0 dan persaingan global (Wijaya et al. 2020). Kebijakan merdeka belajar meliputi empat pokok kebijakan yaitu ujian sekolah berstandar nasional, asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, penyederhanaan RPP, dan peraturan penerimaan siswa zonasi diperluas (Sularto 2020; Ainia 2020). *Pertama*, mulai tahun 2021 ujian nasional diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Permendikbud nomor 43 tahun 2019 telah

menetapkan ujian nasional sebagai kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan (pasal 1 ayat 5). Ujian nasional merupakan penilaian hasil belajar oleh pemerintah pusat yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu (pasal 10 ayat 1).

Kegiatan asesmen kompetensi minimum menekankan kemampuan penalaran literasi dan numerik yang didasarkan pada *best practice* tes PISA dan TIMSS dan penguatan pendidikan karakter. Asesmen kompetensi minimum dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah seperti di kelas 4, 8, 11. Hasil asesmen dimanfaatkan guru dan sekolah dalam memperbaiki kualitas proses pembelajaran. Namun hasil asesmen tidak bisa digunakan untuk seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. Misalnya, hasil asesmen tidak bisa digunakan untuk menentukan kenaikan kelas siswa (Kemendikbud 2019). Asesmen kompetensi minimum dibagi dalam dua bagian yaitu literasi dan numerasi. Literasi menekankan kemampuan menganalisa suatu bacaan dan memahami konsep di balik tulisan atau bacaan tersebut. Sedangkan numerasi menekankan kemampuan menganalisa dan menggunakan angka-angka. Asesmen kompetensi minimum tidak didasarkan mata pelajaran dan penguasaan konten pembelajaran melainkan pada kompetensi dasar yang dibutuhkan siswa untuk bisa belajar apapun mata pelajarannya (Kusumaryono 2020; Resti et al. 2020). Selaras dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan maka ujian nasional diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Asesmen tersebut diharapkan dapat mendorong guru dan sekolah untuk memetakan kondisi pembelajaran dan mengevaluasinya agar dapat memperbaiki mutu pembelajaran. Hal ini sejalan dengan Syarifah (2021) bahwa asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Kualitas sekolah dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar yaitu literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas proses pembelajaran dan suasana sekolah yang mendukung kegiatan pembelajaran. Asesmen nasional merupakan upaya memperbaiki kualitas pendidikan nasional secara menyeluruh yang dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa (Novita et al. 2021; Syarifah 2021).

Kedua, Ujian sekolah berstandar nasional diselenggarakan oleh sekolah. Bentuk ujian berupa tes tertulis dan/atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif, seperti portofolio, tugas kelompok, karya tulis, atau bentuk penugasan lainnya (Kemendikbud 2019). Dalam hal ini guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa. Dalam Permendikbud nomor 43 tahun 2019 dinyatakan bahwa ujian yang diselenggarakan oleh sekolah merupakan penilaian hasil belajar oleh sekolah untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran (bab II, pasal 2 ayat 1). Ujian yang diselenggarakan oleh sekolah dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Ujian yang diselenggarakan oleh sekolah diikuti oleh siswa pada akhir jenjang dengan syarat siswa telah berada pada tahun terakhir pada masing-masing jenjang atau program paket kesetaraan, dan memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar seluruh program pembelajaran yang telah ditempuh pada jenjang pendidikan tersebut (pasal 4).

Penilaian dalam proses pembelajaran merupakan bagian integral dari peran dan tugas guru dalam pendidikan. Penilaian dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi dalam kurikulum dan memberikan gambaran tentang pencapaian tujuan pendidikan. Penilaian dapat dilakukan dalam berbagai bentuk atau instrument penilaian. Dalam konteks tersebut guru menentukan instrumen penilaian yang diperlukan dan menerapkan untuk membangkitkan semangat belajar siswa agar tertantang mempelajari atau mencapai kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Demikian guru dan sekolah dapat lebih merdeka untuk menilai hasil belajar siswa (Sijabat 2014); (Pakpahan 2015).

Ketiga, Penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Melalui penyederhanaan tersebut guru bebas memilih, membuat, menggunakan dan mengembangkan format RPP. Waktu yang digunakan oleh guru mengerjakan administrasi pembelajaran dapat dialihkan untuk kegiatan pembelajaran dan peningkatan kompetensi. RPP tersebut mengandung tiga komponen utama yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Sedangkan komponen lain bersifat pelengkap dan dapat dipilih, dikembangkan secara mandiri oleh guru (Kemendikbud 2019). Hal ini juga dinyatakan secara eksplisit dalam Surat Edaran nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP yang meliputi komponen inti yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Sedangkan komponen lain bersifat pelengkap yang dapat dipersiapkan secara mandiri.

Penyederhanaan RPP ini bertujuan agar guru memanfaatkan lebih banyak waktu untuk mengajar dan meningkatkan kompetensi siswa daripada bergumul dengan administrasi pembelajaran. Fungsi rencana pembelajaran adalah sebagai acuan bagi guru

.....

melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga lebih terarah dan berjalan efektif (Kusnandar 2009; Vidiarti et al. 2019). Walaupun guru mempersiapkan RPP maka persiapan tersebut lebih menekankan hal-hal seperti persiapan tertulis, mental, situasi emosional yang ingin dibangun, lingkungan belajar yang produktif termasuk meyakinkan siswa terlibat secara penuh (Zendrato, 2016). Guru memiliki kebebasan dalam proses pembelajaran untuk memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa (Kusumaryono 2020). Melalui kebebasan guru dalam menyusun RPP maka diharapkan siswa akan lebih banyak berinteraksi secara aktif, dinamis dengan strategi pembelajaran yang diterapkan.

Keempat, sistem penerimaan siswa baru zonasi diperluas atau fleksibel. Bagi siswa dari jalur afirmasi dan prestasi, diberikan kesempatan yang lebih banyak. Pemerintah daerah diberikan wewenang secara teknis untuk menentukan daerah zonasi (Kemendikbud 2019). Dalam Permendikbud nomor 44 tahun 2019 dinyatakan bahwa penerimaan penerimaan siswa baru dilaksanakan melalui jalur zonasi (paling sedikit 50%), afirmasi (paling sedikit 15%), perpindahan (paling banyak 5%), dan prestasi (30%), sesuai dengan daya tampung dan kondisi daerah (pasal 11). Kebijakan penerimaan siswa baru lebih fleksibel dengan mempertimbangkan ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah dimana tidak termasuk daerah terdepan, terluar, tertinggal (Saleh 2020).

Sistem zonasi merupakan sebuah prosedur membagi suatu area menjadi bagian-bagian untuk suatu tujuan tertentu. Sistem zonasi dalam pendidikan bertujuan memberikan layanan pendidikan yang bermutu secara merata bagi anggota masyarakat pada suatu areal tertentu. Hal ini selaras tujuan penerimaan siswa baru Kemendikbud (2018) yaitu (1) menjamin penerimaan siswa baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan adil untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan; (2) menjamin ketersediaan dan kesiapan sekolah memberikan layanan pendidikan yang berkualitas; (3) menjamin pemerataan akses dan mutu pendidikan secara adil pada setiap zona atau wilayah yang ditetapkan dekat tempat tinggal siswa; (4) memastikan terpenuhinya tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai yang dapat disediakan dan digunakan bersama oleh setiap sekolah yang ada di wilayah atau zona yang telah ditetapkan; (5)

mengendalikan dan menjamin mutu lulusan serta melakukan pengawasan proses dan hasil pembelajaran secara komparatif dan kompetitif pada zona layanan pendidikan secara terukur dan berkesinambungan.

Secara umum penerimaan siswa baru diartikan sebagai suatu proses administrasi yang terjadi setiap tahun untuk seleksi calon siswa berdasarkan nilai akademik agar dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi (Nizarman 2015; Vidiarti et al. 2019). Penerimaan siswa baru merupakan proses seleksi calon siswa untuk menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Penerimaan siswa baru dilakukan untuk mengetahui dan mengukur input sekolah sehingga membantu perkembangan sekolah. Penerimaan siswa baru diharapkan memberikan kontribusi dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran (Ansar et al. 2019). Penerimaan siswa baru dalam konteks merdeka belajar harus menjadi salah satu cara membuka pintu perubahan dalam praktek pendidikan di sekolah agar pendidikan anak tuntas dan berkualitas (Totoh 2021).

Landasan Filosofi Merdeka Belajar

Pancasila sebagai falsafah negara Indonesia menjadi filosofi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, termasuk penerapan kebijakan merdeka belajar. Pancasila menjadi filosofi utama kebijakan merdeka belajar sebagai bagian dari keseluruhan kebijakan pembangunan dalam pendidikan. Kebijakan merdeka belajar paling tidak berlandaskan pada empat pandangan filosofi yaitu progresivisme, konstruktivisme, humanisme, dan filsafat antropologi (Muslikh 2020). Dalam konteks Indonesia, landasan filosofi kebijakan merdeka belajar juga dapat ditemukan dalam pandangan Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan (Ainia 2020).

Filosofi Progresivisme: Progresivisme sering dikaitkan dengan kata dasar progres yaitu kemajuan. Progresivisme dapat dimaknai sebagai suatu gerakan perubahan untuk perbaikan (Mustaghfiroh 2020). Progresivisme merupakan suatu pandangan filosofi yang menghendaki kemajuan untuk sebuah sebuah perubahan. Karena itu progresivisme dimaknai sebagai sebuah aliran yang menginginkan perubahan-perubahan secara cepat (Muhmidayeli 2011; Yunus 2016). Filosofi progresivisme memandang proses pembelajaran sebagai proses pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, penciptaan suasana yang alamiah selaras dengan pengalaman siswa. Proses ini diharapkan menciptakan perubahan pada siswa baik pemikiran maupun sikap (Faiz 2020; Muslikh 2020). Pendidikan bukanlah produk yang harus dipelajari siswa (misalnya, fakta dan keterampilan motorik), melainkan sebuah proses yang terus berlanjut selama seseorang hidup. Siswa belajar secara bebas dan baik ketika dia secara aktif mengalami

dunianya, bukan menyerap secara pasif materi pembelajaran yang dipilih oleh guru sebelumnya (Daga 2020b).

Filosofi Konstruktivisme: Filosofi konstruktivisme menjadikan pengalaman langsung siswa sebagai hakekat proses pembelajaran. Pengetahuan merupakan hasil konstruksi atau bentukan siswa. Pengetahuan terbentuk dengan memanfaatkan panca indera. Dari pengalaman indera itulah manusia belajar menghasilkan pengetahuan dan pengalaman (Muslikh 2020; Yusuf & Arfiansyah 2021). Senada dengan pendapat tersebut, Hein dan Boghossian dalam Martini (2017) menyatakan bahwa konstruktivisme dalam pembelajaran adalah suatu filosofi yang memandang proses konstruksi pengetahuan siswa merupakan hasil kegiatan psikologis yang ditunjang oleh proses pengalaman belajar siswa. Siswa melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan cara dan pengalaman untuk memperoleh atau membangun pengetahuan, keterampilan dan sikap. Belajar merupakan proses aktif siswa mengkonstruksi arti, wacana, dialog, pengalaman fisik secara terus-menerus untuk membentuk pengetahuan dan nilai.

Filosofi Humanisme: Humanisme dari kata bahasa latin *humanus* berarti manusia, dan memiliki arti sebagai manusiawi atau sesuai dengan kodrat manusia (Mangunhardjana 1997; Fadli 2020). Filosofi humanisme berpandangan bahwa manusia menentukan diri dan perilakunya dalam mengembangkan diri dan kepribadiannya. Belajar bertujuan menjadikan manusia selayaknya manusia. Keberhasilan belajar ditandai bila siswa mengenali dirinya dan lingkungan dengan baik. Siswa dapat mengaktualisasikan dirinya secara utuh dan maksimal (Sumantri & Ahmad 2019). Filosofi pendidikan humanisme memandang manusia memiliki kehidupan yang penuh kreativitas dan kebahagiaan, dan proses pembelajaran menjadi bagian dari usaha mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan (Wardhana et al. 2020).

Filosofi humanisme melihat keunikan atau karakteristik, potensi dan motivasi yang dimiliki siswa. Proses pembelajaran akan berhasil jika dapat menciptakan perubahan pada diri siswa, baik kognitif, afektif maupun psikomotorik dengan mempertimbangkan kondisi siswa yang memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda-beda (Muslikh 2020; Susilawati 2021). Pendidikan humanisme mengembangkan kualitas siswa secara utuh baik kognitif maupun psikomotorik dan afektif. Dalam proses pembelajaran, dimensi-dimensi

manusiawi dalam diri siswa dikembangkan. Pendidikan humanis menekankan bagaimana cara menjalin komunikasi secara personal dan kelompok dalam lingkungan belajar. Siswa mempunyai pengetahuan, afeksi dan keterampilan. Untuk mengaktualisasi seluruh potensi diri tersebut maka siswa membutuhkan dan diberi kebebasan (Sabaruddin 2020). Kebebasan tersebut difasilitasi oleh guru melalui proses pembelajaran.

Filosofi Antropologis: Secara harfiah, kata *antropos* (bahasa Yunani) berarti manusia dan *logos* berarti studi. Maka antropologi adalah suatu disiplin berdasarkan rasa ingin tahu tentang manusia (Satria et al. 2020). Selanjutnya Poedjawijatna dalam Muslikh (2020) mengatakan bahwa filosofi antropologis memandang bahwa manusia adalah makhluk individu, sosial, moral dan religi. Manusia sebagai makhluk individu menekankan karakteristik unik manusia sehingga proses pembelajaran harus menghargai dan mengakomodir keunikan siswa. Strategi pembelajaran diterapkan untuk mengakomodir keragaman keunikan yang ada. Penilaian pembelajaran ditujukan kepada kompetensi siswa. Manusia sebagai makhluk sosial dalam konteks pembelajaran berimplikasi terhadap semua unsur pendidikan, khususnya guru dan siswa. Guru dan siswa membutuhkan fasilitasi untuk mengembangkan profesi dan potensi, tujuan dan konten pembelajaran mendorong berkembangnya berbagai potensi dan kemampuan siswa, strategi pembelajaran, diperlukan untuk mengembangkan kemampuan kolaborasi.

Manusia sebagai makhluk moral dalam konteks pembelajaran berimplikasi terhadap guru dan siswa untuk mengedepankan perilaku positif. Tujuan dan konten pembelajaran mengandung nilai-nilai moral dan estetika. Strategi pembelajaran mengedepankan sikap teladan, indoktrinasi, hadiah, hukuman. Penilaian pembelajaran diterapkan untuk melihat perkembangan kebaikan siswa dengan memanfaatkan kriteria-kriteria yang valid. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk beragama berimplikasi bahwa guru dan siswa percaya kepada Tuhan. Tujuan dan konten pembelajaran mengemukakan keberadaan Tuhan dan kepercayaan manusia (Muslikh 2020).

Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara: Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah mewujudkan kebebasan siswa dalam belajar dan menekankan perhatian guru sebagai pamong yang bertugas untuk mendidik siswa dengan kasih sayang (Kurniawan 2020). Sistem among adalah cara mendidik yang memberi tuntunan dan menyokong siswa dalam pertumbuhan dan perkembangan serta mendekatkan siswa pada alam dan masyarakat (Wangid 2009). Sistem among menekankan bahwa guru menjadi pamong sesuai dengan fase pertumbuhan dan perkembangan siswa, serta membebaskan siswa dari tekanan dan paksaan yang tidak sesuai dengan prinsip kebebasan dalam

pendidikan (Wardhana et al. 2020). Filosofi Ki Hadjar Dewantara mengenai merdeka belajar dapat dilihat dalam pemikirannya mengenai pendidikan untuk mendorong terhadap perkembangan siswa, yaitu (1) pendidikan bertujuan mencapai perubahan dan bermanfaat bagi lingkungan masyarakat; (2) pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan rasa percaya diri, mengembangkan potensi siswa baik kecerdasan maupun karakter dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan; (3) Guru diharapkan mampu mendidik dengan memegang semboyan *ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani* (Ainia, 2020) yang dapat berarti di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dibelakang memberi dukungan (Musyafa 2015); (4) pendidikan diarahkan kepada kebebasan berpikir bagi siswa dan guru untuk membentuk karakter jiwa merdeka dan mandiri melalui eksplorasi pengetahuan yang berasal dari lingkungan; (5) pendidikan memerlukan keseimbangan cipta, rasa dan karsa yang dalam implementasi tampak juga pada desain, penerapan dan penilaian hasil belajar siswa; (6) pendidikan membentuk karakter siswa dimana mengedepankan proses budaya untuk mendorong siswa agar memiliki jiwa merdeka dan mandiri, membentuk watak siswa berjiwa nasional, namun membuka diri terhadap perkembangan internasional, membangun pribadi siswa berjiwa pionir-pelopor, (7) Pendidikan berarti mengembangkan potensi atau bakat yang menjadi kodrat siswa (Tilaar 2017); (Winarso 2017).

Peran Guru dalam Merdeka Belajar

Sekolah dasar menerapkan kebijakan merdeka belajar dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran sesuai dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut Rahmawati & Rahmawati (2020) penerapan kebijakan dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan cara, yaitu (1) memanfaatkan teknologi sebagai media dan sumber belajar; (2) menyusun perangkat pembelajaran yang memuat tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan assesmen; (3) menerapkan strategi pembelajaran secara bebas sesuai tingkat kompetensi, minat dan bakat siswa; (4) proses pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan sekitar baik kearifan lokal, sosio-ekonomi maupun infrastruktur daerah; (5) proses pembelajaran dilaksanakan dengan menggali kemampuan berpikir kritis dan kreativitas siswa; (6) guru memberikan pilihan kepada siswa untuk menentukan sumber belajar sendiri sesuai dengan

materi pembelajaran; (7) proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara kolaboratif dengan berbagai pihak atau profesi; dan (8) internalisasi nilai-nilai karakter dalam pembelajaran.

Penerapan kebijakan merdeka belajar di sekolah dasar dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai kondisi dan kebutuhan sekolah. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Widiyono et al (2021), langkah-langkah yang perlu disiapkan dalam mengimplementasikan merdeka belajar adalah (1) kepala sekolah menerapkan kebijakan yang mendukung pelaksanaan merdeka belajar; (2) guru menjadi sosok yang terbuka dan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan; (3) hendaknya psikologi siswa dalam keadaan siap dan suasana hati yang bahagia, mulai dibiasakan untuk berpikir kritis dan selalu bersikap ingin tahu serta mampu menganalisis pertanyaan terbuka; (4) orang tua dan lingkungan dilibatkan secara aktif dalam pemantauan hasil belajar siswa dan mendukung kesinambungan antara sekolah, rumah dan lingkungan; (5) dinas pendidikan dan kebudayaan menyediakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru dan menyiapkan pendampingan saat pelaksanaan merdeka belajar. Sejalan dengan pendapat tersebut Hendri (2020) menyatakan bahwa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk membangun merdeka belajar bagi siswa pada lingkup kelas adalah dengan lebih banyak mengajukan pertanyaan pada siswa untuk mendapatkan masukan dalam mengambil keputusan tentang proses belajar, memberi stimulasi bacaan bermutu, memberi kesempatan eksplorasi lingkungan sekitar, memberi kesempatan menganalisis bacaan, memberikan kesempatan bekerjasama dan berdiskusi di antara siswa.

Untuk mensukseskan program merdeka belajar tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan program guru penggerak dengan tujuan meningkatkan kompetensi guru untuk menciptakan pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Peran guru penggerak adalah katalis perubahan pendidikan di daerah melalui (1) menggerakkan komunitas belajar bagi rekan guru di sekolah dan sekitarnya; (2) menjadi pengajar praktik bagi rekan guru berkaitan dengan pengembangan pembelajaran; (3) mendorong peningkatan kepemimpinan siswa di sekolah; (4) membuka ruang diskusi positif dan kolaborasi antar guru dan pemangku kepentingan di dalam dan luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran; (5) menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong kebaikan lingkungan pendidikan di sekolah (Wijaya et al. 2020).

Guru memiliki karakteristik dan peran dalam implementasi kebijakan merdeka belajar di sekolah dasar. Menurut Pratama (2019) karakteristik guru yang merdeka dalam

mendidik siswa adalah guru yang berkarya dengan tulus, guru yang *genuine*, guru yang *sustainable*, dan guru yang memiliki spirit sebagai guru. Guru yang berkarya dengan tulus akan bekerja dengan pantang mengeluh dalam menjalani proses yang keluar dari energi kebaikan dan keyakinan pada idealisme kemanfaatan. Ketulusan mendorong guru tetap berkreasi dalam situasi dan kondisi tanpa berorientasi praktis pada suatu pengakuan. Guru sejati (*genuine*) mampu menghasilkan pemikiran asli dan berorientasi masa depan. Guru sejati memiliki kreativitas yang andal. Misalnya, guru menciptakan sebuah program unggulan, bagaimana guru menjelaskan dan mengaplikasikan teori pendidikan atau pembelajaran menjadi sebuah model pembelajaran yang dapat diterapkan, bagaimana guru menghadirkan media atau alat bantu pembelajaran yang efektif dan inovatif. Guru yang memiliki prinsip *the power of sustainable* (kekuatan berkelanjutan) adalah guru yang tak mudah macet di tengah-tengah dinamika dan inovasi yang ada, guru yang menginspirasi masa depan siswa, guru yang teguh berkarya dalam berbagai situasi dan kondisi, dan guru yang mampu memelihara nilai-nilai kebajikan yang digagas. Pada hakikatnya guru adalah seorang pembelajar yang memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan kecerdasan sosial.

Dalam konteks kebijakan merdeka belajar guru dapat melaksanakan peran- peran secara efektif untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Guru berperan sebagai penggerak yang berperan aktif memelopori perubahan dan peningkatan kualitas pendidikan. Guru tidak hanya mendesain dan mengimplementasikan kurikulum melainkan juga menjadi penghubung antara kurikulum dan minat siswa. Guru dan siswa menjadi subyek dalam pembelajaran. Guru dan siswa bekerjasama mencapai tujuan pembelajaran (Rahmawati & Rahmawati 2020). Kemudian, Miller dan Seller dalam Daga (2021) menyatakan bahwa kurikulum dan siswa terlihat saling melakukan penetrasi secara holistik yang mendorong pengembangan diri siswa. Menurut Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 pasal 10 ayat (8), guru memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Dalam konteks tersebut guru menjalankan tugas sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, penilai bagi siswa dalam mencapai tujuan-tujuan pembelajaran dan pendidikan (Kusnandar 2009;

Arfandi & Samsudin 2021). Sebagai seorang professional maka seorang guru melaksanakan tugas-tugas tersebut.

Selain memiliki kompetensi dalam melaksanakan peran di kelas, peran guru dalam kebijakan merdeka belajar menurut Temple Grandin dalam Munjid (2020) adalah model berpikir, inspirasi dan motivasi, apresiasi dan kepercayaan. Proses pembelajaran merdeka belajar perlu menciptakan lingkungan belajar agar guru dapat menjalankan peran secara optimal sebagai model berpikir bagi siswa, inspirasi dan motivasi siswa, dan apresiasi dan kepercayaan siswa. (1) sebagai model berpikir, guru mampu melihat kelebihan atau potensi siswa daripada kelemahan, serta mampu mengeksplorasi kelebihan untuk perkembangan siswa. Selanjutnya, siswa berpikir sekurang-kurangnya dalam tiga model yaitu model visual, model pola, dan model yang biasa. Dalam model visual, siswa berpikir dalam citra dan detail yang spesifik. Siswa seperti ini sangat cepat belajar geometri yang obyeknya bentuk dan segi-segi konkret tapi selalu gagal memahami aljabar yang abstrak. Dalam model pola, siswa berpikir menonjolkan pola, relasi-relasi abstrak di antara berbagai hal. Siswa yang berpikir dalam model pola akan sangat kuat dalam matematika dan musik tetapi sering lemah dalam menggambar atau bahasa. Dalam model biasa, siswa berpikir dengan logika verbal. Siswa berpikir dalam bahasa, menggunakan susunan kata untuk membentuk pemahaman yang logis. Jurnalisme, sejarah, diplomasi, akuntansi, keuangan, dan seni peran adalah bidang profesi yang cocok untuk model ini. (2) sebagai inspirator dan motivator, guru harus mampu menginspirasi keberhasilan siswa dan memotivasi siswa mengembangkan rasa ingin tahu dan minatnya. Inspirasi dan motivasi dari guru akan membangkitkan antusiasme dan optimism bagi siswa untuk belajar dengan mudah, menyenangkan dan relevan. (3) Guru memberi apresiasi dan kepercayaan kepada siswa. Dengan apresiasi dari guru maka siswa didorong mencari pengetahuan lebih banyak, lebih jauh, dan lebih mendalam baik di dalam maupun di luar kelas. Dengan apresiasi pula guru juga bisa membuka kemungkinan-kemungkinan baru bagi perkembangan siswa. Selanjutnya, dengan kepercayaan dari guru maka siswa mempunyai kemerdekaan untuk membuktikan kemampuan dalam proses pembelajaran. Bahkan, kepercayaan memungkinkan guru untuk melihat perbedaan kapasitas dan kemampuan siswa yang digunakan sebagai peluang mengembangkan pengetahuan dan pemahaman lebih luas siswa. Kepercayaan yang diberikan guru dapat membuat siswa mampu melakukan hal-hal yang mungkin tak terbayangkan sebelumnya.

Menurut Thomas E. Curtis dan Wilma W. Bidwell dalam Zein (2016) peran guru menjadi lebih spesifik dalam proses pembelajaran di kelas. Senada dengan pendapat

tersebut (Minsih & Aninda 2018) menyatakan bahwa peran guru dalam pengelolaan kelas berbasis merdeka belajar adalah pengelola kelas, fasilitator, motivator, demonstrator, mediator, dan evaluator. Sebagai pengelola kelas atau pengelola pengajaran, guru memimpin proses belajar mengajar, menangani masalah atau hambatan yang terjadi selama proses belajar mengajar. Sebagai fasilitator, guru memberikan fasilitas yang diperlukan siswa selama proses belajar mengajar sehingga siswa dapat belajar secara optimal. Sebagai motivator, guru membangkitkan semangat belajar siswa, menjelaskan secara konkret hal-hal yang akan didapat pada akhir pembelajaran kepada siswa, memberi reward kepada siswa yang memiliki prestasi. Sebagai demonstrator, guru memberikan contoh penggunaan alat dan media untuk mengerjakan tugas atau materi dan memperagakan penggunaan alat dan media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Sebagai mediator, guru menjadi perantara dalam usaha mengubah tingkah laku siswa dan juga upaya guru untuk menyediakan dan menggunakan media pembelajaran. Dan sebagai evaluator, guru memantau perkembangan hasil belajar siswa dan membuat rangkuman tentang peningkatan kompetensi siswa dalam pembelajaran.

Peran guru dalam kebijakan merdeka belajar tampak pula dalam peran untuk mengajar dan membimbing, pelatih dan penasehat, inovator, model dan teladan, motivator dan pendorong kreativitas, pekerja dan aktor, pembawa cerita, peneliti dan evaluator (Juhji 2016). Melalui mengajar, guru penyampaian pengetahuan kepada siswa. Sebagai pembimbing, guru memberi bantuan kepada siswa untuk mengenal dan mengenal diri, dan lingkungannya secara tepat dan benar. Sebagai pelatih, guru memberikan latihan intelektual maupun motorik. Sebagai penasihat, guru membantu siswa membuat keputusan dalam pembelajaran. Sebagai inovator, guru menerjemahkan pengalaman yang telah lalu ke dalam kehidupan yang bermakna bagi siswa. Sebagai model dan teladan, guru menunjukkan contoh-contoh yang baik kepada siswa untuk ditiru. Sebagai motivator, guru membangkitkan semangat siswa yang kurang berprestasi atau bermasalah. Sebagai pendorong kreativitas, guru menemukan cara-cara inovatif dan terbaik membimbing siswa. Sebagai pekerja, guru menunjukkan keterampilan dan kebiasaan, terutama dalam kegiatan rutin yang amat diperlukan dan memberatkan. Sebagai pembawa cerita, guru

menyampaikan cerita-cerita tentang kehidupan yang bermanfaat dan memotivasi siswa, khususnya cerita yang mendorong siswa mencapai kompetensi pembelajaran.

Selanjutnya, Gary Flewelling dan William Higginson dalam Kirom (2017) mengatakan bahwa peran guru dalam proses pembelajaran berbasis merdeka belajar adalah: (1) memberikan stimulasi kepada siswa melalui pemberian tugas-tugas pengayaan yang dirancang dengan baik untuk meningkatkan perkembangan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial; (2) berinteraksi dengan siswa untuk mendorong keberanian, mengilhami, menantang, berdiskusi, berbagi, menjelaskan, menegaskan, merefleksi, menilai perkembangan, pertumbuhan dan keberhasilan; (3) menunjukkan manfaat yang diperoleh dari mempelajari materi pembelajaran; (4) berperan membantu, mengarahkan dan memberi penegasan, memberi jiwa dan mengilhami siswa dengan mendorong rasa ingin tahu, antusiasme, semangat peserta didik untuk berani mengambil atau menerima resiko.

Peran guru dalam program merdeka belajar selaras dengan peran kontemporer guru dalam implementasi kurikulum. Dalam pandangan Sumarsono dalam Tokan (2016) peran guru kontemporer meliputi guru sebagai direktur, dirigen, seniman, moderator, fasilitator, guru sebagai *hidden curriculum*. Sebagai direktur, guru menjadi pengelola, dan pemimpin dalam proses pembelajaran. Sebagai dirigen, guru mengatur harmonisasi di dalam kelas. Sebagai seniman, guru kreatif mengatur suasana gembira selama pembelajaran berlangsung. Sebagai moderator, guru mengatur proses interaksi antar siswa, dan antar siswa dan guru. Sebagai seorang intelektual, guru mengelola ilmu pengetahuan dan mengembangkan di kelas. Sebagai fasilitator, guru memberikan kemudahan kepada siswa untuk belajar. Sebagai *hidden curriculum*, guru berpikir jauh ke depan tentang tujuan-tujuan pendidikan, suasana kelas yang mendidik sebagai bagian dari kurikulum.

Akhirnya, merdeka belajar memunculkan peran guru sebagai konselor sekolah. Menurut Nursalim (2020) peran guru sebagai konselor sekolah tampak dalam penerimaan siswa baru zonasi, pelaksanaan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, penyederhanaan RPP, dan dalam pendekatan psikologis kepada siswa. Peran guru sebagai konselor sekolah dalam sistem zonasi penerimaan siswa baru adalah terapeutik dan agen pencegahan. Peran guru sebagai konselor dalam pelaksanaan asesmen kompetensi minimal dan survei karakter adalah sebagai asesmen, koordinator, agen pencegahan, agen perubahan. Peran guru sebagai konselor dalam penyederhanaan RPP adalah sebagai koordinator pengembangan karir, agen perubahan, konseling/psikoterapi, dan agen pencegahan. Peran guru sebagai konselor dalam pelaksanaan pendekatan berbasis

kebutuhan siswa adalah sebagai pengembang karir, konsultan konseling, dan agen pencegahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Kebijakan merdeka belajar meliputi ujian sekolah berstandar nasional, ujian nasional, penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran, dan zonasi penerimaan siswa baru diperluas; (2) Landasan filosofi merdeka belajar meliputi filosofi progresivisme, konstruktivisme, humanism, dan filosofi antropologis, serta filosofi pendidikan Ki Hadjar Dewantara; (3) Peran guru dalam kebijakan merdeka belajar sangat bervariasi yaitu sebagai model berpikir terutama kebebasan berpikir, sebagai mediator, inspirator dan motivator, memberi apresiasi dan kepercayaan kepada siswa, fasilitator pembentukan karakter merdeka. Dalam melaksanakan praktek pembelajaran di kelas guru perlu lebih banyak mengajukan pertanyaan pada siswa untuk mendapatkan masukan dalam mengambil keputusan tentang proses belajar, memberi stimulasi bacaan bermutu, memberi kesempatan eksplorasi lingkungan sekitar, memberi kesempatan menganalisis bacaan-bacaan bermutu, memberikan kesempatan bekerjasama dan berdiskusi di antara siswa. Selain itu peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut (1) mendorong penelitian dan publikasi tentang merdeka belajar sesuai dengan jenjang pendidikan, (2) pelatihan guru sekolah dasar untuk mengimplementasikan kebijakan merdeka belajar dalam proses pendidikan dan pembelajaran, (3) Pengembang kurikulum di sekolah dasar perlu menterjemahkan kebijakan merdeka belajar secara kontekstual sesuai dengan kearifan lokal dan kebijakan nasional pendidikan, (4) Sekolah dasar mendorong dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah, komite sekolah, pemerhati pendidi dalam menerapkan kebijakan merdeka belajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adipura WM. 2008. Analisis Isi. In: Pitra Narendra, editor. *Metodol Ris Komun*. Yogyakarta: Balai kajian dan Pengembangan Informasi Yogyakarta; p. 25–40.
- Ahmal A, Supentri S, Pernantah PS, Hardian M. 2020. *Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru*

- Melalui Pelatihan Perangkat Pembelajaran Abad-21 Berbasis Merdeka Belajar di Kabupaten Pelalawan Riau. In: Pros Unri Conf Ser Community Engagem. Vol. 2. p. 432–439.
- Ainia DK. 2020. Merdeka Belajar Dalam Pandangan Ki Hadjar Dewantara dan Relevansinya Bagi Pengembangan Pendidikan Karakter. *J Filsafat Indones.* 3(3):95–101.
- Amiruddin, Hasim M, Irfan AM. 2020. PKM Guru Pamong dan Mahasiswa KKN PPL Terpadu Melalui Lokakarya Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berbasis Merdeka Belajar Dalam Situasi Pandemi Covid-19. In: Semin Nas Has Pengabd Kpd Masy “Peluang dan Tantangan Pengabd Kpd Masy yang Inov di Era Kebiasaan Baru” Univ Negeri Makasar. p. 1097–1105.
- Ansar NR, T R, Wahed A. 2019. Implementasi Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Online di SMK Negeri 6 Makassar. *J Din Manaj Pendidik.* 4(1):65–72.
- Arafat GY. 2018. Membongkar Isi Pesan dan Media Dengan Content Analysis. *J Alhadrah.* 17(33):32–48.
- Arfandi, Samsudin MA. 2021. Peran Guru Profesional Sebagai Fasilitator dan Komunikator Dalam Kegiatan Belajar Mengajar. *J Edupedia.* 5(2):37–45.
- Bahar H, Sundi VH. 2020. Merdeka Belajar Untuk Kembalikan Pendidikan Pada Khittahnya. In: Pros SAMASTA Semin Nas Bhs dan Sastra Indones. p. 115–122.
- Christiana E. 2013. Pendidikan yang Memanusiakan Manusia. *J Hum.* 4(1):398–410. <https://media.neliti.com/media/publications/167199-ID-pendidikan-yang-memanusiakan-manusia.pdf>
- Daga AT. 2020a. Kebijakan Pengembangan Kurikulum di Sekolah Dasar (Sebuah Tinjauan Kurikulum 2006 hingga Kebijakan Merdeka Belajar). *J Edukasi Sumba.* 4(2):103–110. <http://jurnalstkip-weetebula.ac.id/index.php/jes/article/view/179>
- Daga AT. 2020b. Analisis Tujuan dan Filsafat Kurikulum Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Weetebula Dalam Perspektif Pengembangan Kurikulum Oliva-Gordon. *J Edukasi Sumba.* 4(2):138–152.
- Daga AT. 2021. Analysis of Miller-Seller Curriculum Perspective in Curriculum of Primary School Teacher Education Study Program at Teacher Training and Education College of Weetebula Southwest Sumba East Nusa Tenggara. In: Proceeding Int Conf Innov Sci Technol Educ Child Heal 2021. p. 70–84.
- Fadli RV. 2020. Tinjauan Filsafat Humanisme: Studi pemikiran Paulo Freira Dalam Pendidikan. *Reforma Jurnal Pendidik dan Pembelajaran.* 9(2):96–103.
- Faiz A. 2020. Konsep Merdeka Belajar Pendidikan Indonesia Dalam Perspektif Filsafat Progresivisme. *J Pendidik dan Pembelajaran.* 12(2):155–164. <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/konstruktivisme/index>
- Habsy BA. 2017. Seni Memahami Penelitian Kuliitatif Dalam Bimbingan Dan Konseling : Studi Literatur. *JURKAM J Konseling Andi Matappa.* 1(2):90–100.
- Hendri N. 2020. Merdeka Belajar: Antara Retorika dan Aplikasi. *J E-Tech.* 8(1):1–29.
- Izza AZ, Falah M, Susilawati S. 2020. Studi Literatur: Problematika Evaluasi Pembelajaran Dalam Mencapai Tujuan Pendidikan Di Era Merdeka Belajar. In: Konf Ilm Pendidik Univ Pekalongan 2020. p. 10–15. <https://proceeding.unikal.ac.id/index.php/kip>
- Jayanta INL, Agustika GNS. 2020. Pemahaman Guru Sekolah Dasar Terhadap Kebijakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Merdeka Belajar. In: Semin Nas Ris Inov 2020. p. 403–407. <https://eproceeding.undiksha.ac.id/index.php/senari/article/view/2152>
- Johannes. 2018. Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Dalam Menyusun RPP Melalui Workshop. *J Pena Edukasi.* 5(2):95–98.



- Juhji. 2016. Peran Urgen Guru Dalam Pendidikan. *Stud Didakt.* 10(1):52–62.
- Kamil I. 2020. Ini Penjelasan Mendikbud Nadiem soal Konsep Merdeka Belajar. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/27/16515301/ini-penjelasan-mendikbud-nadiem-soal-konsep-merdeka-belajar>
- Kemendikbud. 2018. *Sistem Zonasi Strategi Pemerataan Pendidikan yang Bermutu dan Berkeadilan*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kemendikbud. 2019. *Merdeka Belajar*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kirom A. 2017. Peran Guru Dan Peserta Didik Dalam Proses Pembelajaran Berbasis Multikultural. *Al Murabbi.* 3(1):69–80. <http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/pai/article/view/893>
- Kurniawan Y. 2020. Implementasi Merdeka Belajar Berdasarkan Ajaran Tamansiswa Dalam Pembelajaran Bahasa Inggris Lembaga Kursus Kelas Anak-Anak. In: *Pros Semin Nas “Implementasi Merdeka Belajar Berdasarkan Ajaran Tamansiswa” Pascasarj Univ Sarjanawiyata Taman Siswa*. p. 103–109.
- Kusnandar. 2009. *Guru Profesional, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kusumaryono RS. 2020. *Merdeka Belajar*. <https://gtk.kemdikbud.go.id/read-news/merdeka-belajar>
- Lestiyani P. 2020. Analisis Persepsi Civitas Akademika Terhadap Konsep Merdeka Belajar Menyongsong Era Industri 5.0. *J Kependidikan J Has Penelit dan Kaji Kepustakaan di Bid Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran.* 6(3):365–372.
- Mangunhardjana A. 1997. *Isme-Isme Dalam Etika Dari A Sampai Z*. Yogyakarta: Kanisius.
- Martini S. 2017. Landasan Filsafat konstruktivisme Dalam Pembelajaran sains. *Mangifera Edu J Biol Pendidik Biol.* 1(2):35–45.
- Minsih M, Aninda GD. 2018. Peran Guru Dalam Pengelolaan Kelas. *Profesi Pendidik Dasar.* 5(1):20–27.
- Muhmidayeli. 2011. *Filsafat Pendidikan*. Bandung: Bandung: Refika Aditama.
- Mulyono P. 2020. Tantangan Merdeka Belajar. *KOMPAS* 21 Pebruari.:6.
- Munjid A. 2020. Peran Guru. *KOMPAS* 11 Desember.:7.
- Muslikh. 2020. Landasan Filosofi dan Analisis Terhadap Kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. *J Syntax Transform.* 1(3):40–46.
- Mustaghfiroh S. 2020. Konsep “Merdeka Belajar” Perspektif Aliran Progresivisme John Dewey. *J Stud Guru dan Pembelajaran.* 3(1):141–147. <https://e-journal.my.id/jsgp/article/view/248>
- Musyafa H. 2015. “Sang Guru”: Novel Ki Hajar Dewantara, Kehidupan, Pemikiran, Perjuangan Pendirian Taman Siswa, 1889-1959. Yogyakarta: M. Kahfi.
- Nizarman. 2015. Manajemen Penerimaan Siswa Baru. *Jurnla Manajer Pendidik.* 9(2):224–234. <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/manajerpendidikan/article/download/1116/925>
- Novita N, Mellyzar M, Herizal H. 2021. Asesmen Nasional: Pengetahuan dan Persepsi Calon Guru. *JISIP (Jurnal Ilmu Sos dan Pendidikan).* 5(1):172–179.
- Nursalim M. 2020. Peran Guru BK/Konselor Dalam Mensukseskan Program Merdeka Belajar. In: *Semin Lokakarya Nas Bimbing dan Konseling 2020 PD ABKIN jatim UNIPA Surabaya*.

p. 11–18.

- Pakpahan R. 2015. Ujian Sekolah Sebagai Upaya Pemetaan Mutu Sekolah Dasar. *J Pendidik dan Kebud.* 21(2):167–181.
- Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional.
- Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- Pratama YA. 2019. Relevansi Teori Belajar Behaviorisme Terhadap Pendidikan Agama Islam. *J Pendidik Agama Islam Al-Thariqah.* 4(1):38–49.
- Probosiwi P, Retnasari L. 2020. Penyusunan RPP Format Terbaru Mewujudkan Merdeka Belajar Bagi Guru Sekolah Dasar di PCM Prambanan. In: *Semin Nas Has Pengabdian Kpd Masy.* p. 409–420. <http://seminar.uad.ac.id/index.php/senimas/article/view/5187>
- Rahmawati DNU, Rahmawati R. 2020. Pembelajaran Sains MI/SD Berbasis Merdeka Belajar di Era Pandemi. In: *Int Conf Fak Tarb dan Kegur Univ Islam Negeri Imam Bonjol Padang.* Vol. 6. p. 131–137.
- Resti Y, Zulkarnain, Astuti, Kresnawati ES. 2020. Peningkatan Kemampuan Numerasi Melalui Pelatihan Dalam Bentuk Tes Untuk Asesmen Kompetensi Minimum Bagi Guru SDIT Auladi Sebrang Ulu II Palembang. In: *Semin Nas AVOER 12.* p. 670–673.
- Rosida A. 2020. “Merdeka Belajar” Melalui Model Pembelajaran Blended Learning. LPMP Provinsi DKI Jakarta. <https://lpmpdki.kemdikbud.go.id/merdeka-belajar-melalui-model-pembelajaran-blended-learning/>
- Rosyidi U. 2020. Merdeka Belajar: Aplikasinya dalam Manajemen Pendidikan dan Pembelajaran di Sekolah. In: *Semin Nas Pasca Sarj UNJ.* p. 1–35.
- Sabaruddin. 2020. Sekolah Dengan Konsep Pendidikan Humanis. *Humanika Kaji Ilm Mata Kuliah Umum.* 20(2):147–162.
- Saleh M. 2020. Merdeka Belajar di Tengah Pandemi Covid-19. In: *Pros Semin Nas Hardiknas.* Vol. 1. p. 51–56.
- Sasikirana V, Herlambang YT. 2020. Urgensi Merdeka Belajar di Era Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Society 5.0. *E-Tech J Ilm Teknol Pendidik.* 8(2):1–8.
- Satria R, Hanum NA, Shahbana EB, Supriyanto A, Ulfatin N. 2020. Landasan Antropologi Pendidikan dan Implementasinya Dalam Pembangunan Indonesia. *Indones J Soc Sci Educ.* 2(1):49–65.
- Siagian R. 2020. Peningkatan Kemampuan Menyusun RPP Merdeka Belajar Melalui Pembinaan Daring Di Masa Pandemi Covid-19. *Inspirasi J Pendidik Mat.* 6(3):60–70.
- Sijabat L. 2014. Meningkatkan Kompetensi Guru Menyusun Instrumen Tes Melalui Model Pelatihan SSOTT di SMA dan SMK Kabupaten Dairi. *J Pendidik dan Kepengawasan.* 1(1):107–118.
- Siregar N, Sahirah R, Harahap AA. 2020. Konsep Kampus Merdeka Belajar di Era Revolusi Industri 4.0. *Fitrah J Islam Educ.* 1(1):141–157.
- Sularto S. 2020. Kebijakan Merdeka Belajar. *KOMPAS* 16 Pebruari.:14–15.
- Sumantri BA, Ahmad N. 2019. Teori Belajar Humanistik dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Fondatia J Pendidik Dasar.* 3(2):1–18.
- Sumarno. 2020. Analisis Isi Dalam Penelitian Pembelajaran Bahasa dan Sastra. *J Elsa.* 18(2):36–55.



- Surat Edaran Nomor 14 tahun 2019 Tentang Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.
- Susilawati N. 2021. Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Dalam Pandangan Filsafat Pendidikan Humanisme. *J Sikola J Kaji Pendidik dan Pembelajaran*. 2(3):203–219.
- Syarifah M. 2021. Tujuan Dan Manfaat Asesmen Nasional. <https://www.msyarifah.my.id/tujuan-dan-manfaat-asesmen-nasional/>
- Tilaar H. 2017. Pendidikan Untuk Mengembangkan Identitas Bangsa. *J Sej*. 1(1):25–33.
- Tokan PRI. 2016. *Sumber Kecerdasan Manusia (Human Quotient Resource)*. Jakarta: Grasindo.
- Totoh A. 2021. *PPDP dan Sekolah Swasta*. Pikiran Rakyat. 11.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- Vidiarti E, Zulhaini, Andrizal. 2019. Analisis Kemampuan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kurikulum 2013. *J-PAI J Pendidik Agama Islam*. 5(2):102–112.
- Wahdani F rizka R, Burhanuddin H. 2020. Pendidikan Keluarga Di Era Merdeka Belajar. *Al-Aufa J Pendidik Dan Kaji Keislam*. 2(1):1–10.
- Wangid MN. 2009. Sistem Among Pada Masa Kini: kajian Konsep dan Praktek Pendidikan. *J Kependidikan*. 39(2):129–140.
- Wardhana IP, Agung SL, Pratiwi VU. 2020. Konsep Pendidikan Taman Siswa sebagai Dasar Kebijakan Pendidikan Nasional Merdeka Belajar di Indonesia. In: *Pros Semin Nas “Implementasi Merdeka Belajar Berdasarkan Ajaran Tamansiswa” Pascasarj Pendidik Univ Sarjanawiyata Tamansiswa*. p. 232–242.
- Widiyono A, Irfana S, Firdausia K. 2021. Implementasi Merdeka Belajar Melalui Kampus Mengajar Perintis di Sekolah Dasar. *Metod Didakt J Pendidik Ke-SD-an*. 16(2):102–107.
- Widodo T, Samad D, Kosim M, Fajri S, Duski FF. 2020. Merdeka Belajar From the Perspective of Family Education. In: *Proceeding Glob Conf Ser Soc Sci , Educ Humanit*. Vol. 6. p. 1–6.
- Widyastuti A. 2020. Persepsi Guru Tentang Konsep Merdeka Belajar Mendikbud Nadiem Makarin Dalam Pendidikan Agama Islam di MTs negeri 3 Sleman. Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Wijaya A, Mustofa MS, Husain F. 2020. Sosialisasi Program Merdeka Belajar dan Guru Penggerak Bagi Guru SMPN 2 Kabupaten Maros. *J Puruhita*. 2(1):46–50.
- Winarso W. 2017. *Dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati.
- Yamin M, Syahrir S. 2020. Pembangunan Pendidikan Merdeka Belajar (Telaah Metode Pembelajaran). *J Ilm Mandala Educ*. 6(1):126–136.
- Yunus HA. 2016. Telaah Aliran pendidikan Progresivisme dan Esensialisme Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan. *J Cakrawala Pendasakrawala Pendas*. 2(1):29–39.
- Yusuf M, Arfiansyah W. 2021. Konsep “Merdeka Belajar” Dalam Pandangan Filsafat Konstruktivisme. *J Stud Kependidikan dan Keislam*. 7(2):120–133.
- Zein M. 2016. Peran Guru Dalam Pengembangan Pembelajaran. *J UIN- Alauddin*. 5(2):274–285. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Inspiratif-Pendidikan/article/view/3480>

